

**DINAMIKA TANTANGAN IMPLEMENTASI PENGENDALIAN SISTEM INTERN
PEMERINTAH MANAJEMEN TERPADU BERBASIS MANAJEMEN MUTU,
MUTU LABORATORIUM, LINGKUNGAN, KESELAMATAN,
ANTI PENYUAPAN DAN KEAMANAN INFORMASI**

Desyawati Utami¹, Nani Mardiah², Ragil Anang Santoso², Roziqyn Yanwar²

¹Universitas Esa Unggul

²Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
desyawati@esaunggul.ac.id¹

Received: 12-06-2024

Revised: 27-06-2024

Approved: 30-06-2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk memetakan proses implementasi Sistem Manajemen Terpadu (SMT) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SIP menghadapi dinamika perubahan ke arah sentralistik. Metode yang digunakan melibatkan pendekatan berbasis risiko dan pemetaan kesesuaian klausul standar terhadap pengendalian Sistem Intern Pemerintah Manajemen Terpadu (SIPMT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi berbagai sistem manajemen ini menghadapi tantangan terkait dengan harmonisasi dan penerapan yang efektif di lingkungan BPOM. Pemetaan persyaratan standar terhadap klausul 6 (perencanaan) dan klausul 8 (operasional) dari SIPMT menunjukkan kebutuhan akan struktur dokumentasi dan pengelola yang jelas. Identifikasi hambatan dalam penerapan SIPMT dan harmonisasi operasional menjadi kunci untuk mencapai perbaikan berkelanjutan sesuai dengan konsep PDCA (Plan, Do, Check, Action). Struktur informasi terdokumentasi SIPMT dan matriks kesesuaian integrasi menjadi alat penting dalam mengatasi tantangan ini. Simpulan, bahwa integrasi berbagai sistem manajemen dan pengendalian internal di BPOM memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dan sistematis. Penguatan struktur pengelola, serta identifikasi dan penanganan hambatan penerapan, sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan memastikan hasil yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Kata Kunci: BPOM, Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO, Pengendalian Internal, SIPMT, PDCA, Pemetaan Kesesuaian.

PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut SIP (Sistem Intern Pemerintah) merupakan acuan dalam melaksanakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Susila, 2012). Unsur SIP terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern (PP No 60 Tahun 2008).

PAS 99 (*Publicly Available Specification 99*) yang dikeluarkan dari *British Standard Institution* Jayusman, (2022) merupakan persyaratan umum untuk sistem manajemen yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja dalam merancang suatu Sistem Manajemen Terpadu (SMT) atau *Integrated Management System (IMS)*. Persyaratan dimaksudkan untuk mendorong institusi yang menggunakan lebih dari satu sistem manajemen memandang PAS 99 sebagai peluang untuk memiliki sistem manajemen tunggal holistik yang memungkinkan mereka menjalankan fungsi proses bisnis secara efektif (Rochmawati et al., 2023). Landasan penerapan utama Sistem Manajemen Terpadu (SMT) adalah pada saat ini sudah tidak relevan lagi menerapkan sistem tunggal atau secara terpisah (Indana, 2022). Implementasi Sistem Manajemen di Lingkungan BPOM sudah dimulai sejak tahun 1999 dengan diraihnya akreditasi untuk sistem

manajemen mutu laboratorium berdasarkan ISO 17025. Dilanjutkan dengan penerapan sistem manajemen mutu di 104 unit organisasi berdasarkan ISO 9001, yang saat ini memasuki periode siklus V, untuk proses resertifikasi BPOM, 29 UKP, 42 Balai Besar POM dan 31 Loka POM.

Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM mengawali proses sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan berdasarkan ISO 37001:2016 dan saat ini SMAP sudah diterapkan oleh 20 unit organisasi dan memasuki siklus kedua, untuk proses resertifikasi Dit. RPO, Insp. Utama, Biro Umum, Pusdatin, 17 Balai Besar POM dan 1 Loka POM. Isu penyakit akibat kerja bagi laboran di Laboratorium Pengujian di Balai Besar POM Medan menjadi pemicu bagi organisasi untuk menerapkan standar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yang sebelumnya adalah OHSAS 18001 dan saat ini menjadi ISO 45001:2018. Saat ini penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sudah masuk periode *surveillance* untuk 1 Laboratorium Pengujian dan 2 Balai Besar POM (Rahmany, n.d.).

Kebutuhan untuk mengelola risiko keamanan informasi rahasia organisasi secara proaktif dan efektif menjadi dasar untuk penerapan sistem manajemen keamanan informasi berdasarkan ISO 27001 oleh Pusdatin. Sistem manajemen ini merupakan acuan dalam mengelola dan melindungi informasi sensitif organisasi secara efisien yang mencakup personil, proses dan sistem informasi teknologi (BSN, 2013). Pencemaran lingkungan tidak dapat dihindari dari hasil keluaran proses bisnis yang tidak diharapkan memicu Unit Kerja di Palangkaraya menerapkan sistem manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14001:2015. Peluang mengintegrasikan keenam sistem manajemen tersebut sangat besar karena memiliki banyak persyaratan standard yang potensial dapat diintegrasikan.

Kajian terhadap proses penerapan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) telah banyak dilaporkan antara lain terkait dengan ragam perspektif (Domigues *et al.*, 20015), design Sistem Manajemen Terpadu (SMT) (Wang & Tsai, 2009; Suprayitno *et al.*, 2020; Rosiawan, 2021;), Sistem Manajemen Terpadu (SMT) terkait efisiensi penanganan peralatan (Zaloga *et al.*, 2009) dan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) terkait proses Audit SISTEM MANAJEMEN TERPADU (SMT) berbasis ISO 9001 dan ISO 27001 dalam Total Quality Management & Business Excellent (Hoy & Foley (2015). Penerapan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) berbasis SMM (ISO 9001), SML (ISO 14001), SMK3 (ISO 45001) dan SMAP (ISO 37001) diantaranya telah diterapkan di PT. Pelindo Jasa Maritim Makassar (Gani, 2023). Penerapan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) mempertimbangkan keenam standar tersebut memiliki banyak kesamaan prosedur operasional, beririsan, dan dapat dikerjakan secara bersamaan. Apabila prosedur tersebut dikerjakan secara sendiri-sendiri maka berdampak pada lamanya waktu pengerjaan dan fokus pekerjaan yang banyak bercabang sehingga pekerjaan tidak terlaksana secara efisien. Tujuan SISTEM MANAJEMEN TERPADU (SMT) adalah tercapainya efisiensi operasional (Harumi *et al.*, 2021).

Umumnya manfaat penerapan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) terkait dengan beberapa aspek antara lain (1) mengurangi duplikasi pekerjaan, (2) mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan, (3) menselaraskan sasaran, (4) menselaraskan tanggung jawab dan wewenang, (5) lebih fokus dalam menyelesaikan masalah, (6) menciptakan konsistensi, (7) meningkatkan efektifitas komunitas, (8) meningkatkan kinerja perusahaan serta (9) mampu menekan jumlah ketidaksesuaian audit pihak ke 3 dan (10) pengendalian informasi terdokumentasi terbukti menjadi lebih efektif dan efisien. Integrasi SMM ISO 9001, SMML ISO 17025, SMAP ISO 37001, SMK3 ISO 45001, SMKI ISO 27001 dan SML ISO 14001 di lingkungan kementerian lembaga (BPOM) sangat

relevan untuk dilakukan sehingga tujuan dalam menjalankan fungsi proses bisnisnya yang efektif dan memberikan jasa pelayanan yang prima dapat terpenuhi. Pembelajaran terkait pemahaman dan implementasi Sistem Manajemen Terpadu (SMT) menjadi penting dalam rangka membangun Sistem Manajemen Terpadu (SMT) yang kuat untuk mendukung mutu, K3, lingkungan proses operasional dan keamanan informasinya yang berintegritas dan akuntabel.

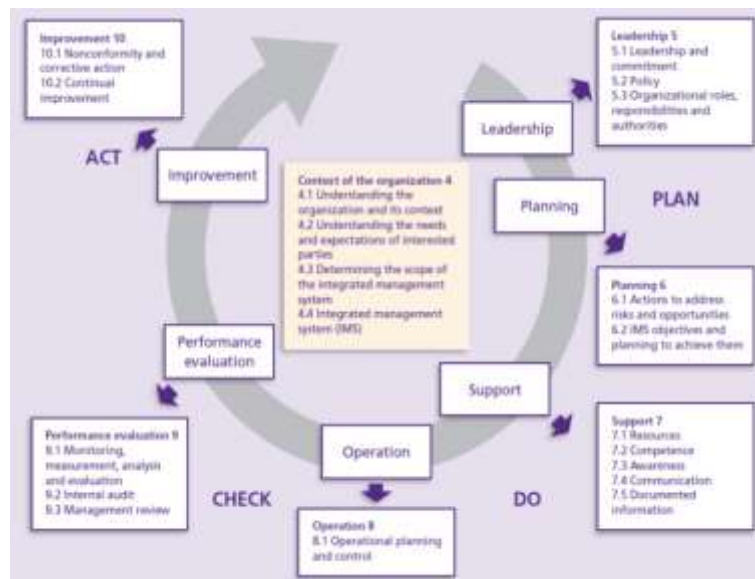
METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Evaluasi pengamatan dilakukan dalam rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis *Awareness* Sistem Manajemen Terintegrasi di Lingkungan BPOM. Kegiatan dibagi menjadi 4 wilayah kerja, Jakarta, Denpasar, Medan dan Makassar pada bulan April-Mei 2024.

Prosedur Kegiatan

Pengamatan ini merupakan *desk research* dengan tujuan untuk mengevaluasi progres integrasi persyaratan standar ISO 9001:2015, ISO 17025:2017, ISO 37001:2016, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013 dan ISO 14001:2015. Secara ringkas tahapan integrasi keenam sistem manajemen tersebut diatas tertera dalam bagan alir pada Gambar 1.

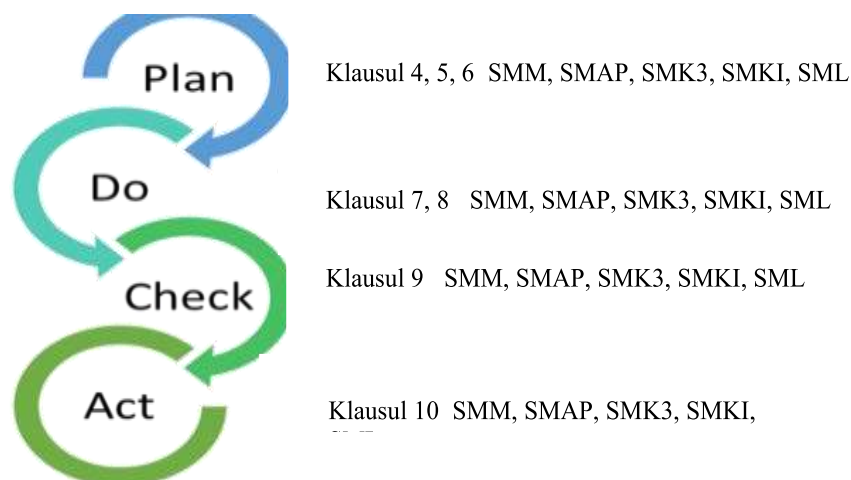


Gambar 1.

Bagan alir proses integrasi SMM, SMML, SMAP, SMK3, SMKI, SML

Proses awal dilakukan melalui pemetaan pada bagian pengenalan sistem manajemen yang mencakup bagian 0.1, 0.2, 0.3 dan 0.4 dan dilanjutkan pemetaan pada klausul pengantar (Klausul 1, 2 dan 3). Tahap ini merupakan integrasi awal sesuai isi klausul pengantar untuk memenuhi persyaratan-persyaratan standar Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015), Sistem Manajemen Mutu Laboratorium (ISO 17025:2017), Sistem Manajemen Anti Penyuaan (ISO 37001:2016), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (ISO 45001:2018), Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001:2013) dan Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015). Proses pemetaan selanjutnya adalah menyusun konsep sistem manajemen terintegrasi berdasarkan siklus

PDCA (*Plan/perencanaan, Do/operasional, Check/evaluasi kinerja, Action/peningkatan*).



Gambar 2.

Bagan alir proses integrasi berdasarkan konsep PDCA & Klausul Terkait

Pada tahap perencanaan ini mencakup lintas klausul 4, 5 dan 6 dengan menghubungkannya agar dapat memenuhi persyaratan-persyaratan keenam standar sekaligus. Pencermatan dan pemetaan ke 4 (empat) klausul tersebut ditujukan untuk menetapkan perencanaan SISTEM MANAJEMEN TERPADU (SMT). Terdapat beberapa persyaratan klausul pada kelima sistem yang kategorinya relevan tetapi terdapat sub-sub klausul yang tidak relevan sehingga membutuhkan beberapa penjelasan dan penambahan narasi penghubung. Proses pemetaan berikutnya adalah tahap operasional yang identik dengan klausul 8 pada keenam standar sistem manajemen. Kegiatan integrasi standar pada klausul 8 dengan melakukan penggabungan lintas standar menambahkan kalimat penghubung sesuai keperluannya serta pembuatan standar mandiri tetapi tetap memenuhi persyaratan-persyaratan keenam sistem manajemen. Proses pemetaan berikutnya adalah tahap evaluasi kinerja yang identik dengan klausul 9 pada keenam standar sistem manajemen. Pada tahap ini semua sub klausul memiliki kesesuaian yang memudahkan integrasi untuk persyaratan SISTEM MANAJEMEN TERPADU (SMT). Proses pemetaan berikutnya pada tahap peningkatan sesuai klausul 10 dari SMM dan SMKI. Pada tahap ini terdapat juga sub-sub klausul yang memiliki kesesuaian yang memudahkan proses integrasi untuk persyaratan SISTEM MANAJEMEN TERPADU (SMT). Proses pemahaman dan implementasi standar Sistem Manajemen Terpadu (SMT) dalam bimbingan teknis *Awareness* Sistem Manajemen Terintegrasi

Analisa Data

Seluruh data primer hasil pengamatan ditabulasi dan dikaji ulang kedalam matriks pemetaan. Berdasarkan matrik pemetaan kesesuaian standar tersebut dilakukan integrasi keenam standar sistem manajemen ke dalam struktur Sistem Manajemen Terpadu (SMT), penetapan struktur informasi terdokumentasi Sistem Manajemen Terpadu (SMT) untuk pemandu proses dan panduan penyiapan bukti operasional Sistem Manajemen Terpadu (SMT), penetapan struktur pengelola Sistem Manajemen Terpadu (SMT), penetapan potensi hambatan penerapan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) dan harmonisasi operasional Sistem Manajemen Terpadu (SMT).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan sistem manajemen yang berlaku lebih dari satu di lingkungan BPOM harus diselaraskan dengan pengendalian Sistem Intern Pemerintah (Argaheni, 2020). Implementasi Sistem Manajemen Mutu, Mutu Laboratorium, Keselamatan Kesehatan Kerja, Anti Penyuapan, Keamanan Informasi dan Lingkungan yang dilakukan secara partial tidak terlepas dari proses penyelarasan menjadi Sistem Manajemen Terpadu (SMT) dengan panduan umum Standard PAS 99 dan beberapa acuan dalam merancang Sistem Manajemen Terpadu (SMT). Pemetaan tahapan penyusunan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) berdasarkan keenam standar sistem manajemen di BPOM diuraikan dalam beberapa aspek yang mencakup:

Pemetaan Standar Sistem Manajemen Terpadu (SMT) (SISTEM MANAJEMEN TERPADU (SMT))

Pemetaan Standar Sistem Manajemen Terpadu (SMT) merupakan proses strategis untuk mengintegrasikan berbagai standar manajemen ke dalam satu sistem yang koheren dan efisien. (Upiyani et al., 2024). Hasil pemetaan standar Sistem Manajemen Terpadu (SMT) berbasis Sistem Manajemen Mutu, Mutu Laboratorium, Anti Penyuapan, Keselamatan Kesehatan Kerja, Keamanan Informasi dan Lingkungan berdasarkan bagan alir pada Gambar 1 dan Gambar 2. Induk Sistem Manajemen Terpadu (SMT) adalah SIP dan persyaratan standar sistem manajemen mutu, mutu laboratorium, anti penyuapan, K3, keamanan informasi dan lingkungan menjadi bagian yang diintegrasikan. Berdasarkan pemetaan dalam Lampiran 1 menunjukkan bahwa terdapat beberapa persyaratan dalam Klausul SMM tidak dipersyaratkan dalam SMK3, SMAP, SMKI dan SML sehingga penempatan beberapa sub klausul SMK3, SMAP, SMKI dan SML tidak selalu selaras sama persis dengan persyaratan dalam sub klausul SMM dan kondisi tersebut sudah dipertimbangkan dalam pemetaan akhir dalam penentuan struktur persyaratan Sistem Manajemen Terpadu (SMT).

Matriks pemetaan berfungsi menjamin seluruh persyaratan standar dari setiap sistem yang diintegrasikan telah terpenuhi. Matrik pemetaan mampu menggambarkan pengurangan kegiatan atau aktifitas rutin yang ditetapkan dalam standar tunggal sehingga operasional Sistem Manajemen Terpadu (SMT) lebih optimal (Handono et al., 2018). Matrik pemetaan dapat menjadi buku pintar bagi pengelola Sistem Manajemen Terpadu (SMT) serta mampu mengeliminir perbedaan akibat dikotomi bukti operasional untuk SISTEM MANAJEMEN TERPADU (SMT) serta untuk operasional proses bisnis organisasi yang pada awalnya masih terpisah. Integrasi operasional Sistem Manajemen Terpadu (SMT) dalam organisasi harus dipastikan efektif yang meliputi risiko, proses dan auditnya. Penyelarasan setiap persyaratan standar dalam operasional Sistem Manajemen Terpadu (SMT) secara berkesinambungan harus dievaluasi pengelola Sistem Manajemen Terpadu (SMT) (Jayusman, 2017).

Struktur informasi terdokumentasi

Pengelompokan level informasi terdokumentasi dalam Sistem Manajemen Terpadu (SMT) BPOM ditetapkan menjadi 4 level yaitu level I dengan istilah Manual Sistem Manajemen Terintegrasi, Level II dengan istilah SOP Makro, Level III dengan istilah SOP Mikro yang dilengkapi Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis dan Pedoman Teknis serta Level IV dengan istilah SOP Teknis atau Instruksi Kerja dan Formulir Kerja. Pada awal penyusunan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) struktur informasi terdokumentasi masih mengakomodir keberadaan dokumen yang sebelumnya telah

ditetapkan dalam sistem tunggal seperti SOP dan RO (*Risk & Opportunity*), kebijakan-kebijakan organisasi yang masih menggunakan penomoran dokumen model sistem tunggal. Kondisi tersebut ditujukan untuk kemudahan awal implementasi Sistem Manajemen Terpadu (SMT) tetapi secara bertahap perubahan istilah dan penomoran sistem tunggal akan bermigrasi secara total dalam model penomoran tunggal dalam Sistem Manajemen Terpadu (SMT). Integrasi informasi terdokumentasi secara spesifik diterapkan dalam penyusunan standar (1) Profil Organisasi BPOM, (2) Proses Bisnis, (3) Susunan dan Kedudukan Organisasi, (4) Kebijakan dan Ruang Lingkup Penerapan, (5) Acuan Normatif, (6) Istilah dan Definisi, (7) Umum dan Organisasi, (8) Sumber Daya, (9) Informasi Terdokumentasi, (10) Proses Operasional dan (11) Evaluasi Kinerja dan Peningkatan.

Struktur Pengelola Sistem Manajemen Terpadu (SMT)

Struktur organisasi pengelola Sistem Manajemen Terpadu (SMT) ditetapkan dengan mempertimbangkan numenklatur di lingkungan BPOM dengan menetapkan Kepala BPOM sebagai Manajer Puncak (MP) dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi sebagai Manajer Representatif (MR). Penyatuan personil MR yang sebelumnya terbagi dalam sistem tunggal akan disatukan dalam Tim MR. Tim yang terdapat dalam pemenuhan sistem tunggal masih relevan dan layak dipertahankan dalam struktur pengelola SISTEM MANAJEMEN TERPADU (SMT).

Dinamika Tantangan dalam Sistem Manajemen Terpadu (SMT)

Keberadaan dinamika perubahan menjadi hal yang tidak dihindari seperti restrukturisasi yang terjadi di Pusat serta peningkatan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis (Barus, 2022). Perubahan tersebut tentunya memiliki implikasi dalam penerapan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) di BPOM. Tantangan dari penerapan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) di lingkungan BPOM adalah pengendalian yang tidak terpusat (Indahri, 2025). Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis memiliki kewenangan dalam mengelola anggarannya untuk meningkatkan kinerja proses bisnis di masing-masing unit. Kebutuhan dalam mencapai tujuan dari jasa pelayanan yang diberikan memicu unit untuk menerapkan sistem manajemen tunggal yang sesuai dengan fungsi unitnya. Proses tindak lanjut dari hasil pemeriksaan antara pelaksanaan dan perencanaan yang telah dilakukan sebagai bentuk peningkatan berkelanjutan untuk masing-masing sistem manajemen yang diterapkan secara terpisah menyebabkan penyerapan anggaran dan sumberdaya berlebih, duplikasi informasi terdokumentasi serta duplikasi proses PDCA untuk tiap proses bisnisnya. Hal tersebut diantisipasi melalui berbagai pendekatan dan salah satunya melakukan integrasi beberapa sistem manajemen yang selama ini sudah diterapkan. Komunikasi secara internal antara MP dan MR di masing-masing unit kerja juga menjadi salah satu hal untuk mengendalikan sistem manajemen yang diterapkan, sehingga penerapan sistem manajemen menjadi terpadu. Implementasi SISTEM MANAJEMEN TERPADU (SMT) menjadi salah satu pilihan yang sifat sangat strategis dan diharapkan organisasi memberikan keberlanjutan jaminan mutu proses, akuntabel, selamat dan sehat, lestari dan informasi yang aman.

Hambatan Implementasi Sistem Manajemen Terpadu (SMT)

Sistem Manajemen Terpadu (SMT) yang pada awalnya dibangun dari beberapa sistem tunggal tentunya masih menyisakan potensi operasional sistem tunggal, dimana kondisi ini tidak sepenuhnya bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Hambatan

komunikasi dan inkonsistensi penerapan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) masih terlihat pada periode awal penerapan Sistem Manajemen Terpadu (SMT). Dalam banyak kasus beberapa faktor penghambat dalam penerapan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) antara lain mencakup (1) penerapan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) yang tidak tepat, (2) masih adanya dikotomi sistem manajemen tunggal, (4) struktur organisasi pengelola dan tugas, pokok dan fungsi yang tidak berjalan, (5) terbatasnya dukungan sumber daya, (6) kurangnya konsistensi, (7) kurangnya kepedulian dan (8) kurangnya pemahaman. Pemetaan faktor penghambat tersebut secara periodik perlu dilakukan untuk menghindari kegagalan dalam penerapan Sistem Manajemen Terpadu (SMT).

Harmonisasi SISTEM MANAJEMEN TERPADU (SMT)

Upaya harmonisasi Sistem Manajemen Terintegrasi Sistem Manajemen Terpadu (SMT) yang dipersenyawakan dalam pengendalian Sistem Intern Pemerintah berdasarkan pengalaman menghasilkan beberapa pendekatan, diantaranya (1) dilakukan secara bertahap atau satu persatu dan (2) penerapan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) pada lingkup tertentu yang secara bertahap ditingkatkan, untuk setiap unit kerja dan unit pelaksana teknis, sehingga perlu ditetapkan *milestone*-nya. Proses implementasi Sistem Manajemen Terpadu (SMT) memerlukan sumber daya, biaya, waktu dan konsekuensi operasional yang selalu menarik untuk dievaluasi dan ditingkatkan dari masa ke masa. Kondisi tersebut sesuai standar persyaratan dalam klausul 10.3 Sistem Manajemen Terpadu (SMT), dimana organisasi diminta untuk selalu melakukan peningkatan secara berkelanjutan. Penetapan informasi terdokumentasi dalam bentuk prosedur kerja terkait peningkatan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) menjadi sangat penting untuk ditetapkan, dibuat untuk panduan operasionalnya. Harmonisasi operasional Sistem Manajemen Terpadu (SMT) minimal dapat dimulai melalui kegiatan terintegrasi berupa pemahaman mengenai Sistem Manajemen Terpadu (SMT) kemudian melakukan tinjau ulang dokumen yang akan diintegrasikan dan melakukan komunikasi yang intensif kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

KESIMPULAN

Pemetaan pengendalian Sistem Intern Pemerintah dan SMM, SMML, SMAP, SMK3, SMKI serta SML dalam Sistem Manajemen Terpadu (SMT) menunjukkan bahwa sebagian besar persyaratan keenam standar tersebut mampu diintegrasikan dengan induk Sistem Manajemen Terpadu (SMT) adalah SIP dan SMM (ISO 9001), SMML (ISO 17025), SMAP (ISO 37001), SMK3 (ISO 45001), SML (14001) dan SMKI (ISO 27001) menjadi bagian yang diintegrasikan. Struktur informasi terdokumentasi dipetakan ke dalam empat strata yaitu Manual Sistem Manajemen Terpadu (SMT) untuk panduan penerapan serta Prosedur Kerja Makro, Prosedur Kerja Mikro dengan Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis dan Pedoman Teknis juga SOP Teknis/Instruksi Kerja untuk operasionalnya. Potensi hambatan pada awal penerapan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) yang telah dipetakan akan dievaluasi secara periodik untuk dasar peningkatan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) secara berkelanjutan.

Evaluasi penerapan SIPMT untuk mengetahui tingkat efektifitas implementasi minimal dilakukan dalam satu siklus PDCA penerapan Sistem Intern Pemerintah Manajemen Terpadu.

Kegiatan terintegrasi dapat ditempuh mencakup (1) peningkatan pemahaman dan interpretasi persyaratan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) melalui bimbingan teknis pemahaman dan implementasi SIPMT, (2) monitoring risiko, (3)

penanganan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan, (4) kegiatan audit internal dan eksternal, (5) tinjauan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) dan (6) kegiatan peningkatan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Argaheni, N. B. (2020). A Systematic Review: The Impact of Online Lectures during the COVID-19 Pandemic Against Indonesian Students. *PLACENTUM Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya*, 8(2).
- Barus, S. I. (2022). *Reformulasi Pengaturan Dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (Kasn) Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Terhadap Undang- Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Reform Regulation And Strengthening Of The . 11(5)*, 283–297.
- Handono, M., Widiyanti, I. D., & Andini, P. P. (2018). Perlindungan Konsumen Terhadap Hasil Produksi Kosmetik Dan Obat Tradisional Melalui Peningkatan Fungsi Dan Kewenangan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Balai Besar Pom) Surabaya. *Jurnal Rechtsens*, 7(2), 117–138.
- Indahri, Y. (2025). *Tantangan Pengelolaan Penduduk Di Kota Surabaya Population Management Challenges In The City Of Surabaya Yulia*. 1–27.
- Indana, N. (2022). *Penerapan Kurikulum Terintegrasi Dalam Mengembangkan Mutu Belajar Siswa (Studi Kasus di SMA Darul ' Ulum 1 Unggulan BPPT Jombang)*. 121–147.
- Jayusman. (2017). *Review Implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi*. 99, 160–170.
- Jayusman. (2022). Dinamika tantangan dalam implementasi sistem manajemen terintegrasi berbasis sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keamanan informasi. *Prosiding SNPBS (Seminar Nasional Pendidikan Biologi Dan Saintek)*, 2015, 453–462.
- Rahmany, S. (n.d.). Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah. *2022*, 193–222.
- Rochmawati, D. R., Hatimatunnisani, H., & Veranita, M. (2023). Mengembangkan Strategi Bisnis di Era Transformasi Digital. *Jurnal I*, 14(1), 101–108.
- Susila, O. A. (2012). Kajian Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Bekasi. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 1–24.
- Upiyani, Cahyawati, I., Supendi, S. S., Nugraha, E., & Hidayat, W. (2024). Prinsip-Prinsip Dasar Evaluasi Dan Implikasi Dalam Menilai Instruksi Iman Islam Di Lembaga Pendidikan. *Jurnal PAI Raden Fatah*, 6(1), 184–204.
<https://doi.org/10.19109/pairf.v6i1>